



RENJA

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Badan Kepegawaian Daerah
Jl. Mojopahit No 5 Larangan Sidoarjo 61217
Telp. (031) 8921307 Fax. (031) 8948507
Website : www.bkd.sidoarjokab.go.id

DAFTAR ISI

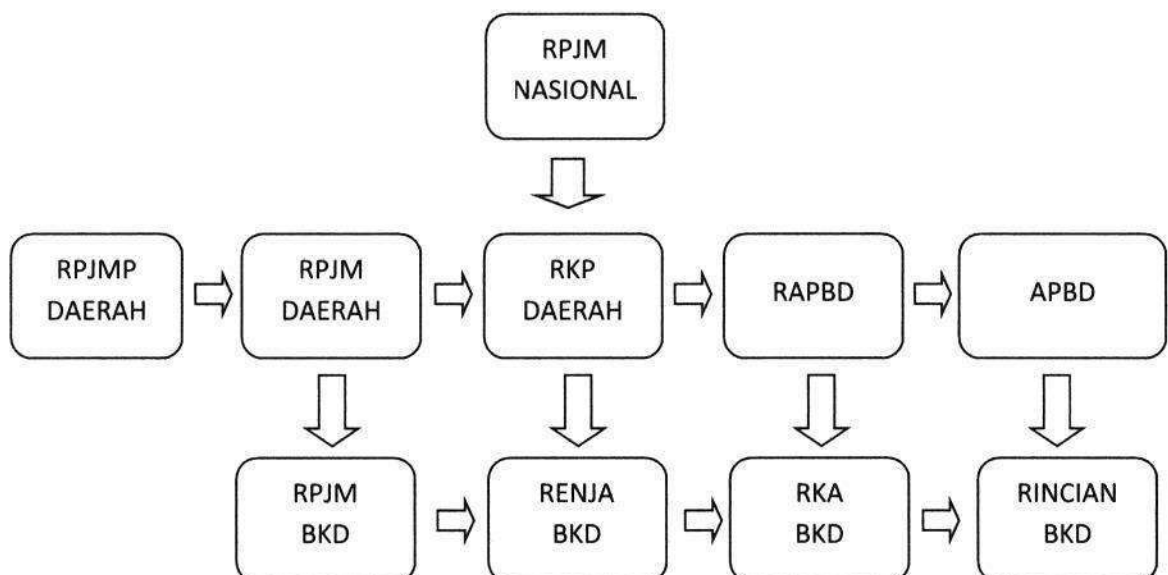
	Hal
DAFTAR ISI	i
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	3
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	4
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.....	9
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.....	12
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	15
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	16
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	17
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	17
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	21
BAB V : PENUTUP	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA – PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1(satu) tahun. Renja PD merupakan penjabaran Renstra PD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh PD dalam satu tahun anggaran. Pada Renja PD diharapkan mampu menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo mengacu pada rancangan awal RKPD serta Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju dan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan, alternatif dan atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo disusun berdasarkan RPJM Daerah dan RPJM Nasional, dimana dokumen ini dibuat sebagai acuan dalam menyusun Renja dan RKA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Setelah Renja dan RKA tersusun, tahap berikutnya bisa dilakukan penyusunan rincian APBD yang nantinya akan disahkan dalam APBD. Berikut ini disajikan hubungan keterkaitan antara RENJA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan dokumen perencanaan lainnya.



1.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaannya Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Renja sebagai pedoman acuan perencanaan progam dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1.3.1. MAKSUD

Maksud disusunnya Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu :

- Untuk memberikan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis sehingga mampu mengantisipasi perkembangan masa depan.

- Membantu pengambilan keputusan untuk memilih secara rasional diberbagai kemungkinan, sumber daya yang harus dialokasikan, sejalan dengan tujuan dan sasaran serta hasil yang diharapkan.
- Menyusun Program dan Kegiatan kedepan berdasarkan potensi serta fungsi Badan Kepegawaian Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3.2. TUJUAN

Tujuan penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 adalah untuk mengidentifikasi kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam memahami RENJA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang membahas antara lain tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- BAB II : Pada bab ini dijelaskan antara lain Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, Analisis kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD.
- BAB III : Pada bab ini dijelaskan antara lain ; Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran renja Badan Kepegawaian Daerah.
- BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- BAB V : Merupakan bab penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Secara umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Bupati Sidoarjo untuk melaksanakan kebijakan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bagi PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Realisasi Program / Kegiatan Tahun 2021 yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan sebagai berikut : Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2020 terdiri dari 3 (tiga) program dalam mencapai 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran.

Analisis capaian kinerja di masing-masing kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang Pengembangan, Bidang Mutasi, Bidang Pendidikan dan Pelatihan serta Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 dapat dijelaskan pada uraian berikut ini :

2.1.1 TUJUAN

Membangun SDM aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang profesional

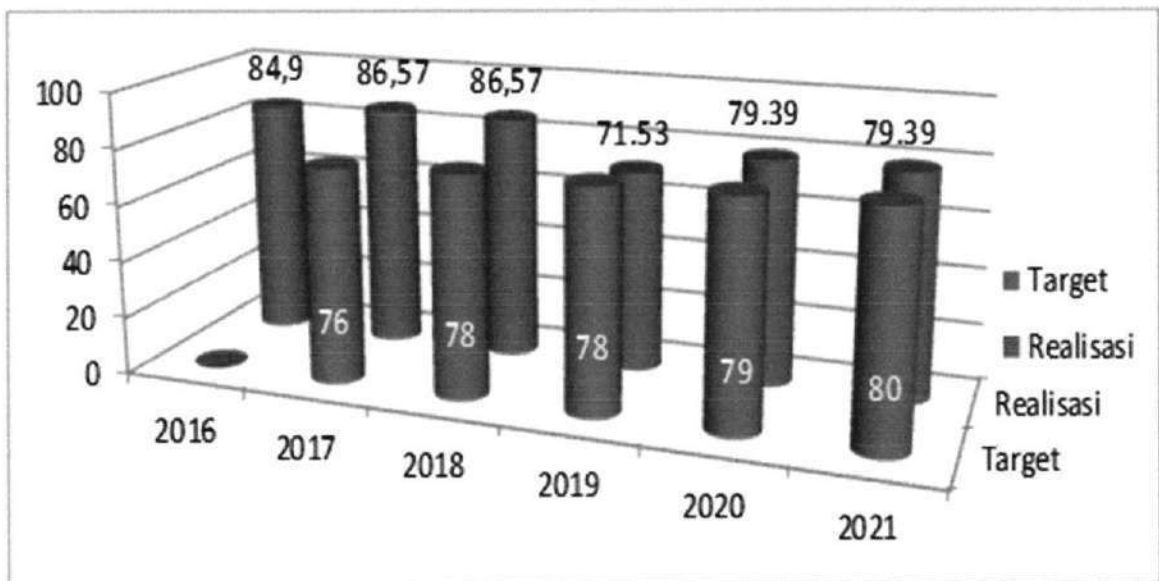
Tujuan strategik Badan Kepegawaian Daerah disusun berdasarkan hasil identifikasi faktor lingkungan strategik, yang harus ditangani dan dihadapi dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Tujuan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu "Membangun SDM aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang profesional".

Indikator Tujuan "**Indeks Profesionalisme ASN**" yang didefinisikan sebagai alat untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN di Kabupaten Sidoarjo.

Sesuai surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 810/B-BH.02.01/SD/C/2022 Tanggal 13 Januari 2022 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun, pengukuran IP ASN Tahun 2021 dilakukan dengan aplikasi online pada alamat website <https://ip-jasn.bkn.go.id>. Mekanisme penginputan tiap unsur instrumen pengukuran dilakukan melalui updating pada aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (import data). Proses input dan integrasi data SAPK BKN dan IP ASN saat ini sedang berlangsung serta

membutuhkan waktu untuk sinkronisasi dan sampai saat ini belum didapatkan nilai final. Mendasari hal tersebut, Hasil Indeks Profesionalitas (IP) ASN yang disajikan pada Renja ini adalah nilai IP ASN Tahun 2021. Sampai dengan Tahun 2021 kinerja jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Membangun SDM aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang profesional	Indeks Profesionalisme ASN	N/A	84,90	76	86,57	78	86,57	78	71,53	79	79,39	80	79,39



Indeks Profesionalisme ASN

Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:

1. 91-100 (Sangat Tinggi)
2. 81-90 (Tinggi)
3. 71-80 (Sedang)
4. 61-70 (Rendah)
5. 60 ke bawah (Sangat Rendah)

Capaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data menunjukkan bahwa profesionalitas aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada kategori sedang yaitu sebesar 79 (capaian sebesar 99,23% atas target). Terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

- a. Terdapat perbedaan kebijakan mendasar dalam perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, yaitu :

	2018	2019, 2020 dan 2021
Dasar hukum perhitungan	Instruksi Badan Kepegawaian Negara 2017	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019
Unsur Penilaian	a. kompetensi b. kompensasi, c. kinerja, d. disiplin	a. kualifikasi b. kompetensi c. kinerja, d. disiplin
Segmen perhitungan	Pejabat struktural (670 orang)	Seluruh PNS (10.484 orang)
Rumus perhitungan	$IP = (K_{ef}(1-gaps)) + ((k_{oef} \times KJ)/100) + (k_{oef}(1-Si)) + (k_{oef}(1-Indisp))$	$IP = (K_{oef} \text{ Kualifikasi})25\% + (k_{oef} \text{ Kompetensi})40\% + (k_{oef} \text{ Kinerja})30\% + (k_{oef} \text{ Disiplin})5\%$
Sumber data	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pemkab Sidoarjo	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Badan Kepegawaian Negara
Metode perhitungan	Manual	Aplikasi online

- b. Kurang validnya data kompetensi pada SAPK, karena update data dilakukan pada SIMPEG
- c. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses input dan sinkronisasi untuk import data dengan SAPK BKN.

Langkah-langkah yang diambil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk solusi permasalahan di atas adalah mulai tahun 2020 membentuk tim yang bertanggungjawab sesuai unsur-unsur penilaian yang ada untuk membangun data yang valid pada SAPK BKN dengan cara langsung melakukan update pada aplikasi SAPK BKN.

2.1.2 SASARAN

Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang didukung kualitas layanan administrasi kepegawaian yang prima

Badan Kepegawaian Daerah sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas mengelola sumber daya manusia aparatur di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki sasaran meningkatkan kualitas penataan sumber daya manusia aparatur di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang didukung kualitas layanan administrasi kepegawaian yang prima ditunjukkan dengan indikator sebagai berikut:

2.1.2.1 Prosentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya

Pada tahun 2021 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo menetapkan target sasaran penempatan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan kompetensinya sebesar 70%. Berdasarkan penempatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, diperoleh data pengukuran kompetensi ASN, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA DAERAH	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
	TAR GET	REALI SASI	TAR GET	REALI SASI	TAR GET	REALI SASI	TAR GET	REALI SASI	TAR GET	REALI SASI	TAR GET	REALI SASI
Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya	55 %	63,8 0%	67 %	69,4 0%	67 %	70,2 9%	70 %	73,8 5%	70 %	77,3 5%	73 %	79,02 %

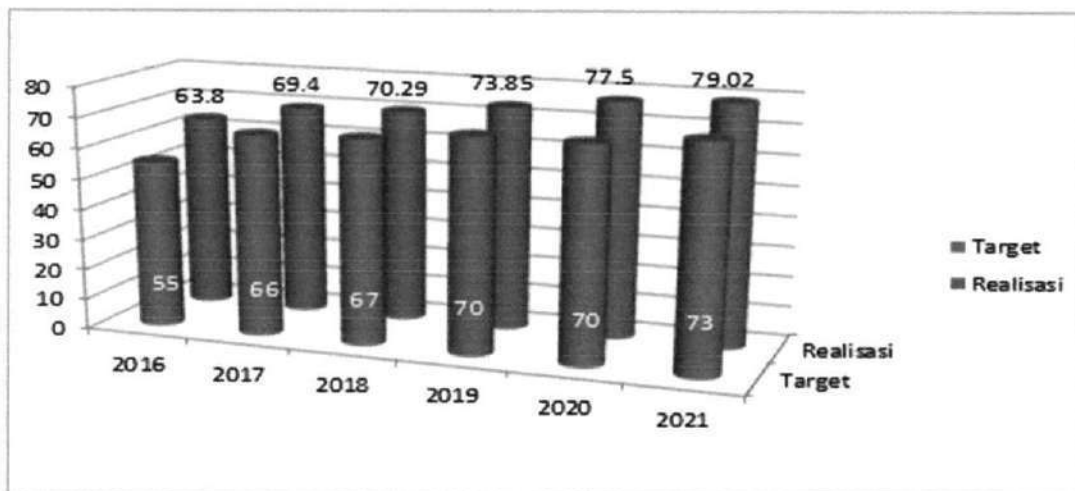


Table Data Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensinya

Uraian	Jumlah ASN (31 Des 2021)	Terpetakan	ASN yang telah ditempatkan sesuai dengan kompetensinya					
			2021	2020	2019	2018	2017	2016
Jumlah ASN JFT	7160	7160	7160	7630	7409	7.507		
Jumlah ASN JFU	2698	1246	748	854	589	322		
Jumlah ASN J. Struktural	402	402	190	158	343	267		
Jumlah ASN Kab. Sidoarjo	10260	10260	199	8642	8.341	8.096		
			79,02	77,35%	73,85 %	70,29%	69,4%	63,8%

Sehingga capaian Badan Kepegawaian Daerah sebesar 108,24% atas target di tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 73%.

2.1.2.2 Indeks Layanan Kepegawaian

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

Perbandingan Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Publik di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021.

No	Unsur Pelayanan	Nilai SKM					2016
		2021	2020	2019	2018	2017	
1	Persyaratan	5.7144	90,95	79.73	78.21	76.55	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	5.6610	89,7	79.4	78.01	76.29	
3	WaktuPenyelesaian	5.6449	88,18	76.67	74.53	74.61	
4	Biaya / Tarif	5.6690	89,9	97.33	94.12	79.9	
5	Produk Spesifikasi dan Jenis Pelayanan	5.6479	88,73	80.75	77.87	77.77	
6	Kompetensi Pelaksana	5.6560	89,45	80.73	79.28	78.67	
7	Perilaku Pelaksana	5.6449	89,7	81.81	78.81	78.61	
8	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	5.6138	88,25	79.11	77.61	76.35	
9	Sarana dan Prasarana	5.6313	87,05	90.5	89.21	77.56	
Nilai SKM		93.29	88,992	82.06	80.05	77.56	77.28

Dari data diatas jika disandingkan dengan data tahun sebelumnya akan terlihat sebagaimana tabel berikut :

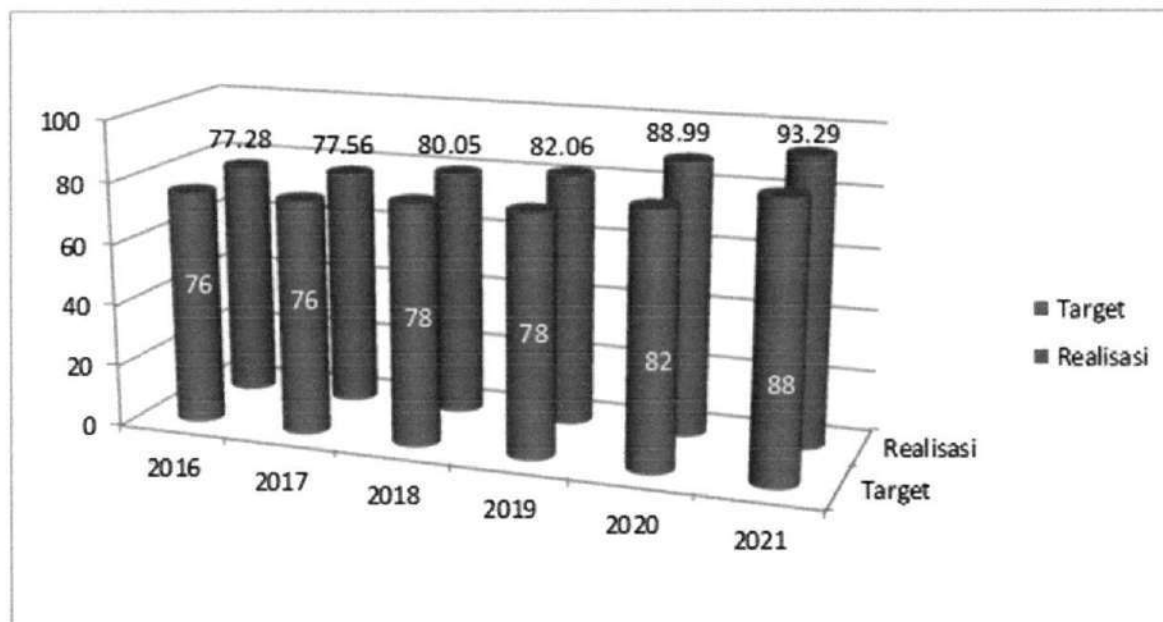


Table data Indek Kepuasan Aparatur

Hal ini dapat dilihat bahwa kondisi tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 terdapat kenaikan 5,29 point dan capaian sebesar 108,5 % atas target point 88 di tahun 2021, hal ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan dikarenakan adanya berbagai macam inovasi dan perubahan aplikasi layanan yang

telah tersosialisasikan atas implementasi SOP yang ada. Dan kondisi ini akan terus dilakukan perbaikan dari berbagai evaluasi internal sebagai usaha perwujudan meningkatkan layanan administrasi kepegawaian yang prima.

Table 1
Kategorisasi Mutu Pelayanan

Nilai interval IKM	Nilai interval konversi IKM	Mutu pelayanan	Kinerja unit pelayanan
1,00 - 1,75	25,00 – 43,75	A	TIDAK BAIK
1,76 – 2,50	43,76 - 62,50	B	KURANG BAIK
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	C	BAIK
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	D	SANGAT BAIK

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pelayanan yang telah dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka terlaksananya tugas pokok dan fungsinya yaitu :

- a) Penyusunan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugasnya.

Kinerja dari masing-masing bidang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota** dengan anggaran sebesar Rp. 11.241.600.624,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.956.080.387,- atau 97,46 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	PERSENTASE
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	79%	79%	100%

Program tersebut didukung oleh 6 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	PERSEN TASE
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran PD	85%	85%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	83	83	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Yang Diadakan	3 jenis	3 jenis	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Perkantoran	100%	100%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilakukan Pemeliharaan	5 Jenis	5 Jenis	100%

2. **Program Kepegawaian Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 3.137.208.732,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.000.471.895,- atau 63,77%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	PERSENTASE
Persentase ASN yang Telah Ditempatkan Sesuai Dengan Formasi Jabatan	100%	100%	100%

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	PERSEN TASE
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Prosentase Data PNS Yang Di Update	100%	100%	100%
Mutasi dan Promosi ASN	Prosentase Administrasi Mutasi Jabatan, Kepangkatan, Pemberhentian Dan Pensiun Yang terselesaikan	100%	100%	100%
Pengembangan Kompetensi ASN	Prosentase PNS Berkinerja Baik Dan Sangat Baik	80%	80%	100%
Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Prosentase Layanan Pembinaan Dan Layanan Kesejahteraan	100%	100%	100%

3. **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia** dengan anggaran sebesar Rp. 3.281.315.268,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.027.689.650,- atau 92,27 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Prosentase ASN Yang Meningkatkan Kompetensinya	18%	18%	100%

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Pengembangan Kompetensi Teknis	Prosentase PNS yang Berdayaguna Hasil Mengikuti Diklat	70%	70%	100%
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional	Prosentase Peserta Diklat Yabg Lulus Bersertifikat	80%	80%	100%

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Isu utama dalam manajemen administrasi kepegawaian daerah adalah adanya kebijakan Nasional tentang reformasi birokrasi yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) Tahapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai berikut :

1. Quick Win,
2. Manajemen Perubahan,
3. Penataan dan Penguatan Organisasi,
4. Penataan Tatalaksanaan,
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur,
6. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan,
7. Penataan Pengawasan Internal,
8. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, dan
9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam usaha mengimplementasikan kebijakan nasional tentang reformasi birokrasi di daerah terdapat permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu kebijakan nasional belum dituangkan dan diakomodasi dalam kebijakan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra Kabupaten, Renstra BKD) . Hal ini dikarenakan kebijakan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra Kabupaten, Renstra BKD) tidak seiring dengan ditetapkannya road map reformasi birokrasi dari pemerintah pusat.

Selain itu isu penting dalam manajemen SDM aparatur adalah adanya system merit. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen SDM Aparatur yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Secara umum penerapan pengelolaan SDM berdasarkan UU ASN adalah sebagai hal berikut:

1. Penerapan merit system dalam pengelolaan SDM;
2. Perencanaan Pengembangan SDM berdasarkan kebutuhan kompetensi dan jumlah pegawai yang tertuang di dalam human capital development plan;
3. Pola karir, yang mewajibkan adanya standar kompetensi jabatan dan job person match, penilaian perilaku dan kinerja serta rekam jejak pegawai;
4. sudah dilakukan seleksi dan promosi secara adil, pelaksanaan sistem rewards and punishment, serta standar integritas dan perilaku.

➤ **KELEMAHAN DAN KEKUATAN INTERNAL SKPD**

Adapun Kelemahan dan Kekuatan Internal Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

A. KELEMAHAN

- Kebijakan SKPD yang dituangkan dalam Renstra daerah belum semuanya mengakomodir kebijakan nasional dalam usaha terwujudnya reformasi birokrasi.
- Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kerja yang ada belum memadai
- Referensi ketentuan perundang-undangan belum memadai dalam aturan dan regulasi yang dijabarkan secara lebih teknis
- Masih adanya SDM yang menangani beberapa tugas, pokok dan fungsi yang ada.

B. KEKUATAN

- Adanya dukungan pimpinan daerah
- Adanya pimpinan PD yang berintegritas tinggi dan profesional
- Adanya struktur organisasi dan tata kerja yang jelas
- Adanya kewenangan yang jelas.
- Adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi maka Pemerintah Daerah baik itu propinsi maupun Kabupaten/Kota diberikan wewenang untuk melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional.

➤ **PELUANG DAN TANTANGAN EXTERNAL SKPD**

Adapun Peluang dan Tantangan External Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu :

1) PELUANG

- Kemudahan dalam koordinasi dengan instansi vertikal (BKN) karena posisi kantor BKN berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
- Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai pengelola administrasi manajemen kepegawaian di Pemerintah Daerah Sidoarjo dijadikan sebagai Pilot Project kebijakan nasional antara lain (Pilot Project Penataan PNS, Pelaksanaan Test CPNS dengan metode CAT)

- Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo sering dijadikan sebagai tempat kunjungan dan study banding dari Kabupaten maupun Provinsi lain dalam proses tata kelola manajemen kepegawaian.

2) TANTANGAN

- Masih banyaknya perubahan regulasi tata kelola manajemen kepegawaian baik skala nasional maupun provinsi.
- Masih banyaknya kepentingan dari pihak eksternal maupun politik dalam penentuan tata kelola penempatan dan repositioning jabatan dalam proses mutasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Dalam tata kelola kebutuhan dan penyediaan SDM pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sering terjadi pengaburan kebutuhan SDM dengan adanya pengangkatan tenaga Sukwan dan honorer oleh tiap SKPD tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Faktor – faktor sebagai penentu keberhasilan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Adanya peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian
2. Adanya peningkatan kompetensi aparatur birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo

Dari langkah-langkah tersebut, teridentifikasi ada isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah antara lain:

1. Peningkatan kompetensi aparatur birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo
 - a. Peningkatan kompetensi SDM melalui Diklat Struktural maupun Diklat Teknis Fungsional
 - b. Peningkatan kompetensi SDM melalui pengiriman tugas belajar maupun tugas kediklatan
 - c. Pemenuhan SDM yang berkualitas melalui penerimaan CPNS sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan yang ada.
2. Peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian,
 - a. Peningkatan Kualitas layanan tata kelola administrasi ,
 - b. Peningkatan kualitas layanan kepangkatan, pensiun,
 - c. Penempatan jabatan yang sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan.

Indikator kinerja yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah disusun dengan cermat melalui beberapa pertimbangan. Pertama, indikator tersebut bersifat terukur baik bentuk, jumlah, maupun jangka waktunya. Kedua, indikator yang disusun berdasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo. Hal ini tercermin melalui keterkaitan antara visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah dengan visi dan misi Kabupaten Sidoarjo.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yang memuat program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada Rancangan awal RKPD dan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Daerah.

Anggaran Belanja Langsung Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada Tahun 2019 Rancangan Awal RKPD Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari 5 (Lima) Program dan 17 (tujuh belas) kegiatan.
- b. Pada Tahun 2020 Rancangan Awal RKPD Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari 5 (Lima) Program dan 15 (lima belas) kegiatan.
- c. Pada tahun 2021 Rancangan Awal RKPD Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari 3 (tiga) Program dan 10 Kegiatan dengan 39 Sub Kegiatan.

Program yang dilaksanakan pada tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menstandarkan program, kegiatan dan sub kegiatan di seluruh Indonesia melalui aplikasi SIPD yang diharapkan melalui aplikasi ini akan dengan mudah didapatkan data pembangunan secara massif serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standart Harga Satuan Regional dalam merencanakan pendanaannya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Prioritas pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah pemulihan kondisi ekonomi negara yang hancur karena dengan adanya pandemic Corona Virus SARS 2 (Covid 19) yang pertama kali muncul pada akhir Maret 2019 hingga saat ini dan belum dapat diprediksi kapan akan berakhir melihat kondisi yang terjadi penambahan jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid 19 terus meningkat (belum terjadi trend penurunan) Dimana dalam upaya pemutusan rantai penyebaran Corona Virus SARS 2 (Covid 19) kita diwajibkan penerapan protocol kesehatan yang ketat (cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan disinfektan, menggunakan masker untuk menghindari droplet dan Physical distancing/ menjaga jarak) dan menghindari kerumunan dan bahkan pembatasan social berskala besar, yang mengakibatkan terhentinya roda perekonomian dan menjadikan banyaknya pemutusan hubungan kerja dan menurunnya daya beli masyarakat. Untuk itu pemerintah pusat selain penanganan langsung terhadap segi kesehatan juga focus pada program pemulihan ekonomi masyarakat.

Terhadap kebijakan nasional Badan Kepegawaian Daerah mempunyai posisi untuk mendukung prioritas pembangunan untuk Pembangunan Manusia melalui penyiapan aparatur yang berkompeten melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pembangunan manajemen kepegawaian dengan menggunakan system merit yang memberikan kepastian kepada aparatur untuk berkarir secara jelas dan adil, dengan menerapkan pembinaan dan mengusahakan kesejahteraan kepada aparatur sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima.

Tema RKPD Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah **"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Sektor Ekonomi Masyarakat"**. Sedangkan prioritas Pembangunan Tahun 2022 Kabupaten Sidoarjo diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Nasional, terdiri dari :

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sector riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energy dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang pertama yaitu Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, melalui pembangunan manusia (aparatur Pemkab Sidoarjo) yang profesional sehingga mampu mandiri dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

3.2.1 Tujuan Renja Badan Kepegawaian Daerah

Dalam rangka mendukung misi pertama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha”, dengan tujuan “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha” serta sasaran pertama “Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital”, maka ditetapkan tujuan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Matriks Renstra terbaru hasil review kedua sebagai berikut :

”Membangun SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang profesional berbasis sistem merit.”

3.2.2. Sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah

Guna mewujudkan tujuan tersebut maka disusunlah sasaran Badan Kepegawaian Daerah sebagai berikut :

”Meningkatkan kualitas penataan SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang didukung kualitas layanan administrasi kepegawaian yang prima.”

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagaimana dipahami bersama bahwa tujuan dan sasaran sebagai bagian perencanaan strategi adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi yang dapat diukur dengan baik, dirumuskan dalam program serta dijabarkan dalam aktifitas atau kegiatan yang disusun dalam dimensi waktu(tahunan). Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo ditunjang dengan 3 (tiga) program yang berhubungan dengan fungsi Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang wajib harus

diterapkan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 dengan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri.

Adapun secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, terdiri dari 6 kegiatan, sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - f. Penyediaan Bahan/Material
 - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - d. Pengadaan Mebel
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Mebel
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Pada Program Kepegawaian Daerah , terdiri dari 4 kegiatan, sebagai berikut :

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan :
 - a. Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
 - b. Pengelolaan Data Kepegawaian
2. Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengelolaan Mutasi ASN
 - b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
3. Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan :
 - a. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 - b. Pengelolaan Assessment Center
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - b. Pembinaan Disiplin ASN

3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada program ini terdiri 2 (dua) kegiatan yaitu

1. Pengembangan Kompetensi Teknis, dengan sub kegiatan :
 - a. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Keterbatasan Dana Alokasi Umum yang diberikan Pemerintah Pusat seiring dengan kondisi perekonomian tahun 2020-2022 yang terganggu akibat adanya pandemic Covid 19 memaksa Pemerintah Daerah untuk bijak dalam membagi alokasi dananya dalam mendukung prioritas penanganan pandemic Covid 19, pemulihan perekonomian masyarakat dengan tetap melaksanakan roda pemerintahan yang harus berjalan. Untuk itu pada tahun 2023 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo merencanakan Kinerja sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	56.786.458
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	113.394.500
	Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang	9.357.971.844
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	11.338.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	36.417.997	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	45.414.980
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.058.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	198.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	11.628.600
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4.368.000
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	31.800.010
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	20.980.000
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.945.450.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	93.060.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	51 Unit	604.097.962
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	937.463.000

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6.235.346
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	422.500.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.185.511.620
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	86.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	50.500.000
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	54 Unit	10.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	267.000.000
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	223.400.000

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000
Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1.364.227.696
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	245.203.082
	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	687.604.506
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	305.194.705
	Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	10.460 Orang	227.605.410
		Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	427.684.776
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1.500 Orang	301.897.580
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 Orang	237.892.632

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	4 Dokumen	1.137.096.830
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	3.091.604.406

BAB V

PENUTUP

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Kerja (RENJA) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta berpedoman pada Rencana Awal RKPD serta Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan.

Penetapan visi dan misi serta usulan program yang tertuang didalam Renja merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang akan datang. Penyusunan Renja ini disamping bertujuan untuk melakukan pengukuran kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, juga sebagai upaya sistematis terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.

Sidoarjo, April 2022

**Pt.KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**


IMAM MUKRI AFANDY, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196702241988091001